



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0517) 21076-21050
KANDANGAN 71211

SOSIALISASI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

B. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN

Pada Perubahan APBD TA. 2019 pendapatan daerah mengalami penyesuaian target sesuai hasil evaluasi atas realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam tahun 2019. Selain itu, penyesuaian dengan bagian dana transfer pemerintah pusat dan perkiraan dana bagi hasil pajak provinsi untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta perhitungan-perhitungan ulang perubahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan diharapkan SKPD pengelola pendapatan bekerja secara maksimal untuk mengintensifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Dari ketiga kelompok besar sumber pendapatan daerah, secara umum pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini ditargetkan meningkat sebesar Rp359.075.968.999,00 atau 35,22%. Target kenaikan paling besar terdapat pada pos dana perimbangan Rp310.442.006.212,00 atau 86,46%, disusul dengan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp57.109.944.000,00 atau 15,90%, sedangkan pos pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp8.475.981.213,00 atau 2,36%.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tetap dengan memaksimalkan potensi

yang ada di samping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Terutama pada jenis pendapatan asli daerah yang menjadi perhatian utama dalam mengupayakan peningkatan secara maksimal. Sehingga pada akhirnya diharapkan jenis penerimaan ini merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang menjadi sumber bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wujud nyata dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aturan pelaksanaannya sehingga pemungutannya dapat lebih maksimal, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, melakukan peninjauan kembali beberapa peraturan daerah untuk disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga melakukan penyesuaian tarif sesuai kewajaran.

Selain itu, evaluasi yang dilaksanakan pada bidang pendapatan terutama yang berkaitan dengan PAD akan selalu dilaksanakan untuk evaluasi dan perbaikan bagi seluruh SKPD pemungut agar lebih maksimal dalam upaya mencapai target pendapatan. Sehingga hasil dari rapat evaluasi itu akan menjadi bahan bagi SKPD dalam melaksanakan terobosan-terobosan baru dalam upaya memaksimalkan potensi PAD yang ada.

Untuk kelompok dana perimbangan, upaya intensifikasi penerimaan dari sumber dana transfer dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, penguasaan terhadap aturan tentang pembagian dana perimbangan yang menjadi hak daerah serta pembuatan data untuk bahan konsolidasi dan perhitungan bagian daerah juga sangat diperlukan, sehingga kita tidak sekedar pasif menunggu bagian yang diberikan namun juga dapat aktif dalam upaya menuntut bagian yang menjadi hak daerah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun anggaran 2019 serta mempertimbangkan realisasi PAD tahun anggaran 2018;
2. Perubahan alokasi pendapatan Bantuan Operasional Sekolah dari pos PAD ke pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Perubahan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hasan Basry Kandungan;
4. Perubahan pendapatan yang berasal dari dana kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Perubahan kebijakan alokasi dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2019 dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018; dan
6. Perubahan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2019.

C. GAMBARAN UMUM BELANJA

Mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2019 secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2019 belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2018 harus digunakan untuk Belanja Daerah; pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah; serta penambahan anggaran belanja

pegawai pada belanja tidak langsung untuk pemenuhan kewajiban pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu penambahan anggaran belanja pegawai juga untuk menganggarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah Rp1.565.891.437.131,00, naik sebesar Rp413.442.122.798,00 atau 35,88% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.152.449.314.333,00. Belanja tidak langsung semula berjumlah Rp681.842.628.000,00 bertambah Rp117.812.980.710,00 atau 17,28% sehingga menjadi Rp799.655.608.710,00. Kelompok belanja langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp766.235.828.421,00 meningkat sebesar Rp295.629.142.088,00 atau 62,82%.

Permasalahan perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 ini adalah pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan maupun pembiayaan sehingga masih belum dapat secara maksimal mengakomodir seluruh usulan penambahan anggaran dari SKPD. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya kebijakan dari Pemerintah terkait kewajiban belanja mandatory infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya keras meningkatkan penganggaran belanja berkaitan dengan peningkatan infrastruktur.

Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar maupun urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
2. Peningkatan belanja bantuan sosial untuk pembelian beras untuk masyarakat miskin untuk mendukung program beras sejahtera;
3. Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program-program yang mengarah pada pelayanan publik dan menjadi prioritas pada tahun berjalan;
4. Penambahan belanja pegawai pada belanja tidak langsung sehubungan dengan penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru dengan sumber Dana Alokasi Khusus yang tidak diperkenankan dianggarkan pada APBD TA.2019;
5. Peningkatan belanja modal dalam upaya pemenuhan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah.
6. Peningkatan belanja terkait infrastruktur dalam upaya pemenuhan kewajiban belanja mandatory bidang infrastruktur.
7. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
8. Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diselesaikan pada tahun berjalan.

Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah serta kemampuan keuangan daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sekitar 51,07% dan belanja langsung 48,93% dari total belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah mempertimbangkan pada besarnya penerimaan pendapatan daerah dan kekuatan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi belanja pegawai dan belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sehingga pada akhirnya

manfaatnya benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk menutupi perkiraan defisit ditargetkan mengalami penambahan Rp54.366.153.799,00 menjadi Rp187.248.978.933,00 dari sebelum perubahan yang berjumlah Rp132.882.825.134,00 atau naik 40,91%.

Dalam pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, yaitu Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Piutang Daerah.

E. PENUTUP

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Pendapatan Daerah	1.019.566.489.199,00	1.378.642.458.198,00	359.075.968.999,00	35,22
1,1	Pendapatan asli daerah	154.815.716.199,00	146.339.734.986,00	(8.475.981.213,00)	(5,47)
1,2	Dana perimbangan	698.231.800.000,00	1.008.673.806.212,00	310.442.006.212,00	44,46
1,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	166.518.973.000,00	223.628.917.000,00	57.109.944.000,00	34,30
2	BELANJA DAERAH	1.152.449.314.333,00	1.565.891.437.131,00	413.442.122.798,00	35,88
2,1	Belanja Tidak Langsung	681.842.628.000,00	799.655.608.710,00	117.812.980.710,00	17,28
2,2	Belanja Langsung	470.606.686.333,00	766.235.828.421,00	295.629.142.088,00	62,82
	SURPLUS/(DEFISIT)	132.882.825.134,00	187.248.978.933,00	54.366.153.799,00	40,91
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	Penerimaan pembiayaan	132.882.825.134,00	187.248.978.933,00	54.366.153.799,00	40,91
3,2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	132.882.825.134,00	187.248.978.933,00	54.366.153.799,00	40,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera, agamis dan produktif.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004